



**PENGATURAN TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**



Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**Pengaturan tentang Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak sebagai
Korban Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Viktimologi**
(Eva Silvia Ningsih S, 2320112004, Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 107 halaman, 2026)

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban semakin meningkat setiap tahunnya, diperlukan perlindungan khusus terkait hak anak terutama hak restitusi. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai peraturan terhadap hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, perlindungan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi, dan perbandingan pengaturan pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia dan di California. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pengaturan restitusi yang berkaitan dengan anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPKS, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Banyaknya aturan mengenai restitusi ini dinilai belum efektif karena tata cara pelaksanaan pemberian restitusi belum seragam antara aturan satu dengan yang lainnya dan bentuk pemberian ganti ruginya juga berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dalam pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk pemulihan dari apa yang dialami korban tidak terlepas dari viktimologi yang memberikan pemahaman mengenai permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya untuk menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab, sehingga aspek viktimologi sangat penting untuk proses penanganan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan restitusi di Indonesia belum sepenuhnya berpihak terhadap korban, karena masih banyak kelemahan dalam pengaturannya, seperti mekanisme permohonan restitusi yang harus diajukan oleh korban atau wali korban dan adanya alternatif apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi karena ketidakmampuan ekonomi. Sedangkan di California, restitusi dijatuhkan otomatis dari pengadilan dan alasan ketidakmampuan ekonomi pelaku tidak dapat menghapus hukuman untuk membayar restitusi terhadap korban. Perbandingan ini sebagai bentuk acuan terhadap pengaturan mengenai restitusi terutama terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual agar hak anak sebagai korban kekerasan seksual semakin diperhatikan lagi. Indonesia perlu menambah ketentuan terhadap restitusi dalam peraturan perundang-undangan seperti mekanisme pelaksanaan yang jelas dan otomatis tanpa harus melalui permohonan untuk memudahkan korban mendapatkan haknya berupa ganti kerugian dari pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Kekerasan Seksual, Anak, Viktimologi.

Regulations Concerning the Fulfillment of Restitution Rights for Children as Victims of Sexual Violence Reviewed from a Victimology Perspective

(Eva Silvia Ningsih S, 2320112004, Master of Laws, Faculty of Law, Andalas University, 107 pages, 2026)

ABSTRACT

Criminal acts of sexual violence against children as victims are increasing every year, requiring special protection regarding children's rights, especially the right to restitution. This study examines regulations regarding the right to restitution for children as victims of sexual violence in Indonesia, the protection of the right to restitution for children as victims of sexual violence from a victimology perspective, and a comparison of regulations concerning the fulfillment of restitution rights for children as victims of sexual violence in Indonesia and in California. This research method uses a normative juridical approach. The results of the study are regulations that specifically regulate restitution related to children as victims of sexual violence are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime. The many regulations regarding restitution are considered ineffective because the procedures for implementing restitution are not uniform between one regulation and another and the form of compensation is also different, so that it can cause doubt in its application and the absence of legal certainty in its implementation. In fulfilling the right to restitution as a form of service and recovery from what the victim experienced cannot be separated from victimology which provides an understanding of the problem of crime by studying the victims of crime, the process of victimization and its consequences to suppress crime more responsibly, so that the victimology aspect is very important for the process of handling, protecting and fulfilling the rights of victims of criminal acts of sexual violence. Restitution regulations in Indonesia are not fully pro-victim, due to numerous weaknesses, such as the mechanism for restitution requests, which must be submitted by the victim or the victim's guardian, and the availability of alternatives if the perpetrator cannot pay restitution due to financial inability. Meanwhile, in California, restitution is automatically imposed by the court, and the perpetrator's financial inability does not waive the victim's obligation to pay restitution. This comparison serves as a reference for restitution regulations, particularly for child victims of sexual violence, to ensure greater attention is paid to the rights of children affected by sexual violence. Indonesia needs to add provisions regarding restitution in legislation, such as a clear and automatic implementation mechanism without having to go through an application to make it easier for victims to obtain their rights in the form of compensation from perpetrators of criminal acts.

Keywords: *Right to Restitution, Sexual Violence, Children, Victimology.*